

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan pembangunan ekonomi merupakan isu yang saling terkait erat. Pembangunan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pada saat yang sama, kemiskinan dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan membatasi pengembangan sumber daya manusia, mengurangi produktivitas, dan membatasi investasi (Mansi *et al.*, 2020). Kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga mengatasi kemiskinan merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, agar dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Mansi *et al.*, 2020).

Elfindri *et al.*, (2019) menyatakan bahwa untuk memahami persoalan kemiskinan ada dua pendekatan kajian yang perlu dilakukan. Pertama mempelajari penyebab utama kemiskinan, dan kedua kajian yang berkaitan dengan penyesuaian kemiskinan atau apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga miskin agar kehidupannya tidak lebih memburuk atau keluar dari kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut maka strategi pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan pendekatan yang dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan. Sehingga penting untuk mengetahui kondisi kemiskinan dan apa yang menyebabkan kemiskinan, sehingga program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan dapat menyesuaikan kondisi kemiskinan yang terjadi.

World Bank (2022) melaporkan terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2020, dimana jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat 11 persen dari 648 juta menjadi 719 juta. Sementara laporan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) pada tahun 2020 melaporkan bahwa di 107 negara berkembang, sekitar 1,3 miliar orang hidup dalam kemiskinan multidimensi dan mayoritas dari mereka tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah (UNDP & OPHI, 2020).

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari tujuan utama agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan pengukuran kemiskinan saat ini lebih menekankan pada pendekatan moneter yang hanya melihat dari sisi pendapatan sebesar \$2,15/hari, dimana individu dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan berada dibawah nilai tersebut dikatakan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim (Aguilar *et al.*, 2022).

Sen (1983) mengkritik pendekatan ini, menurutnya pendekatan ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil permasalahan kemiskinan. Alkire & Santos (2014) juga menyatakan bahwa tingkat pendapatan saja tidak tepat untuk bisa dijadikan proksi dalam menyatakan kemiskinan dalam masyarakat. Kemiskinan bukan hanya sekedar tidak mampu dalam berdaya beli, tapi juga ketidakmampuan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam mengakses sumber daya ekonomi, barang dan fasilitas publik serta memaksimalkan potensi mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan pengukuran kemiskinan dilengkapi dengan pengukuran kemiskinan secara multidimensi. Meskipun tidak sempurna, pendekatan multidimensi menyoroti aspek-aspek lain dari kemiskinan dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengadopsi kebijakan dan intervensi yang tepat untuk menangani aspek-aspek tersebut dengan lebih terukur (Srbinoski *et al.*, 2021). Pendekatan pengukuran multidimensi mampu memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kondisi kemiskinan dan perbedaannya diseluruh kelompok umur dan daerah atau lokasi dimana kemiskinan berada, karena pendekatan ini memperhatikan hak-hak dasar yang harus terpenuhi, yang sangat berarti bagi individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan (UNDP & OPHI, 2022).

Agenda SDGs 2030 '*leave no one behind*' menjadikan pengukuran kemiskinan secara multidimensi sebagai sorotan utama diantara para peneliti dan pembuat kebijakan yang berkomitmen untuk segera mengakhiri kemiskinan. Tahun 2030 agenda SDGs menargetkan setengah dari proporsi perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang berada dalam jurang kemiskinan setidaknya berkurang dan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih baik bagi yang miskin dan rentan (United Nation, 2015). Komitmen global ini mendesak untuk meningkatkan pengukuran kemiskinan anak, terutama di negara-negara berkembang untuk

menangkap berbagai deprivasi/kekurangan yang muncul dari sifat kemiskinan yang beragam (Fonta *et al.*, 2018).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa harus anak-anak. Para ahli berpendapat bahwa mereka yang mengalami kemiskinan dimasa kanak-kanak dan berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang lebih lama akan menyebabkan kurangnya pendidikan dan sumber daya yang memadai. Hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang baik, menyebabkan masalah perilaku, menjadi perilaku kriminal dan pada akhirnya akan mengganggu dan menghambat rencana pembangunan berkelanjutan (Yang, 2019).

UNICEF (2016) menegaskan bahwa anak-anak merupakan kunci dan modal yang sangat penting supaya tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Menurut Heckman (2012) salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan investasi yang difokuskan pada tahun-tahun pertama kehidupan anak-anak, perkembangan anak di usia dini secara langsung akan mempengaruhi hasil ekonomi, kesehatan, dan sosial bagi individu dan masyarakat. Investasi sejak dini akan membantu anak-anak untuk mencapai potensi penuh yang mereka miliki, mengembangkan kapasitas yang mereka miliki, menciptakan peluang untuk memaksimalkan *human capital* mereka dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan berpartisipasi dalam pertumbuhan di masyarakat serta mencegah terjadinya kemiskinan yang terus berlanjut antar generasi (UNICEF, 2016). Kemiskinan yang dialami anak-anak akan menghambat mereka untuk mencapai kapasitas penuh dalam meraih potensi tersebut (Duncan, 2019).

United Nation mendefinisikan kemiskinan anak sebagai serangkaian kekurangan gizi, kekurangan air bersih dan fasilitas sanitasi, akses kelayakan perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal, pendidikan, partisipasi dan perlindungan yang membuat anak-anak tidak dapat menikmati hak mereka, mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi penuh sebagai anggota masyarakat (Fernández & Chanes, 2021). Anak-anak yang tumbuh menjadi orang dewasa yang miskin lebih mungkin memiliki anak-anak yang miskin juga di masa depan (Moore, 2012). Agar kemiskinan dapat diputus dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya maka pengentasan kemiskinan sebaiknya dimulai dari anak-anak dengan berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar yang harus terpenuhi bagi

anak-anak, dimana perhatian yang lebih serius harus difokuskan pada anak dari keluarga miskin (UNICEF, 2021).

UNDP & OPHI (2020) mencatat bahwa separuh dari penduduk miskin ekstrem dunia saat ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ketika pandemi COVID-19, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, jumlah anak miskin meningkat sebesar 10 persen atau lebih dari 100 juta anak jatuh ke dalam kemiskinan. UNICEF (2021) juga memproyeksikan bahwa di negara berkembang, persentase anak yang hidup dalam kemiskinan multidimensi meningkat dari 46–48 persen sebelum COVID-19 atau sekitar 1 miliar anak dan menjadi sekitar 52 persen pada tahun 2021 yang setara dengan proyeksi peningkatan 100 juta tambahan anak yang hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan 2019. Dalam skenario terbaik, UNICEF memprediksikan waktu yang dibutuhkan agar kondisi kemiskinan anak kembali pulih seperti sebelum adanya Covid-19 adalah tujuh hingga delapan tahun.

Srbinoski *et al.*, (2021) menyatakan kemiskinan anak berbeda dengan kemiskinan orang dewasa. Anak-anak lebih rentan terhadap kemiskinan dan jika terjebak dalam kemiskinan sejak lahir lebih mungkin bagi anak-anak untuk tetap miskin. Menurutnya, pengukuran satu dimensi yang hanya dilihat dari sisi pendapatan tidak dapat menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya dialami oleh anak-anak, karena pendekatan ini tidak mampu menangkap informasi pemenuhan hak-hak dasar yang harus terpenuhi bagi anak-anak. Selain itu, pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan memiliki kelemahan dengan mengasumsikan bahwa setiap anggota rumah tangga memiliki akses terhadap sejumlah pendapatan yang sama. Namun pada kenyataannya distribusi pendapatan diantara anggota rumah tangga tidaklah proporsional (Hulme & Mckay, 2007).

Pada tahun 2003 peneliti dari *Bristol University* memperkenalkan metode pengukuran kemiskinan anak secara multidimensi berdasarkan pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar anak. Metode ini dikenal dengan *Bristol method* dengan domain terdiri dari delapan dimensi hak dasar anak yaitu dimensi air bersih, fasilitas sanitasi yang layak, kesehatan, perumahan, Pendidikan, informasi dan akses terhadap pelayanan dasar serta dimensi makanan. Konsep kemiskinan anak dalam pendekatan multidimensi berfokus terutama pada deprivasi dan menganggap bahwa anak miskin kekurangan kebutuhan dasarnya. Berdasarkan pendekatan ini, anak-

anak dikatakan miskin jika terdeprivasi minimal pada dua dimensi kebutuhan dasarnya (Gordon *et al.*, 2003; Roelen *et al.*, 2010). Deprivasi adalah suatu kondisi dimana anak-anak tidak mampu memenuhi dimensi kebutuhan dasarnya atau ketidakmampuan mereka mengakses sumber-sumber dan fasilitas yang berkaitan dengan perkembangan potensi penuh mereka (Feeny & Boyden, 2003).

B. Rumusan Masalah

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin tahun 2020 adalah 26,42 juta jiwa atau secara persentase sebesar 9,78 persen. Sementara itu pada tahun 2021 tercatat penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen, artinya meningkat 0,36 persen dibandingkan tahun 2020, sedangkan dari segi jumlah, penduduk miskin bertambah 1,12 juta orang.

Menggunakan pendekatan multidimensi (Aidha; *et al.*, 2021) menemukan bahwa pada sebanyak 21,5 juta penduduk di Indonesia miskin multidimensi pada tahun 2018, rata-rata terdeprivasi pada 3 dimensi atau lebih kebutuhan dasar. Sementara Prakarsa (2023) membandingkan angka kemiskinan yang diukur dengan pendekatan multidimensi dan pendekatan moneter. Hasil penelitiannya menemukan bahwa angka kemiskinan yang diukur secara multidimensi konsisten selalu di atas angka kemiskinan moneter, dimana pada tahun 2021 persentase kemiskinan yang diukur secara moneter sebesar 9,9 persen sementara pengukuran secara moneter persentase kemiskinan adalah sebesar 14,3 persen.

Berdasarkan pengukuran secara moneter tren yang sama juga terjadi pada persentase penduduk miskin berdasarkan kelompok umur, dimana persentase penduduk miskin dengan kelompok umur kurang dari 18 tahun, dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin dengan kelompok umur di atasnya. Pada tahun 2015 misalnya, persentase kemiskinan dengan kelompok umur kurang dari 18 tahun adalah sebesar 13,67 persen, sedangkan kelompok umur di atasnya hanya sebesar 10,01. Tren ini terus berlanjut, walaupun terjadi fluktuasi pada persentase kemiskinan setiap tahunnya, namun persentase penduduk miskin dengan kelompok umur dibawah 18 tahun selalu lebih besar

dibanding kelompok umur di atasnya. Tahun 2021 persentase kemiskinan kelompok umur kurang dari 18 tahun adalah sebesar 12,64 persen sementara persentase kemiskinan kelompok umur di atasnya sebesar 9,09 persen.

Menggunakan pendekatan multidimensi (BPS, 2017) menemukan bahwa anak usia dini umur 0-4 tahun umumnya terdeprivasi sebanyak 2 atau 3 dimensi kebutuhan dasarnya. Sementara pada umur 5-17 tahun umumnya terdeprivasi sebanyak 1 atau 2 dimensi. Secara rata-rata, sebanyak dua dari tiga (64,95 persen) anak umur 0-17 tahun mengalami deprivasi setidaknya pada 2 dimensi. Semakin banyak dimensi-dimensi yang terdeprivasi akan meningkatkan risiko semakin tinggi peluang anak untuk tetap miskin di masa depan (Birhanu *et al.*, 2017).

Menilik kebijakan pemerintah yang ada saat ini salah satunya adalah berupa program bantuan tunai bersyarat yang menysasar pada pemberian bantuan kepada keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan. Menurut Bima dan Marlina (2017) program seperti ini hanya mendukung anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya tidak hanya anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang dilanda kemiskinan. Anak-anak tanpa masalah keuangan pun masih dapat menderita beberapa kekurangan karena mereka hidup di lingkungan yang kekurangan. Kondisi ini menghambat akses mereka terhadap layanan dan infrastruktur yang ada. Kondisi keuangan yang lebih baik tidak berarti anak anak bebas dari deprivasi apapun. Oleh karena itu, menggunakan kemiskinan moneter untuk menggambarkan kemiskinan anak tidak dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan anak-anak.

Berbagai literatur kemiskinan anak menemukan bahwa faktor sosial demografi seperti karakteristik anak, karakteristik rumah tangga dan karakteristik kepala rumah tangga diduga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan anak. Diantaranya adalah Srbinoski *et al.*, (2021) menemukan bahwa pendidikan orang tua dan pendidikan anak serta jumlah anak dalam keluarga merupakan penentu penting kemiskinan anak. Ferrone & Chzhen, (2015) mengungkapkan bahwa pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan dan status bekerja KRT serta jumlah anak, adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan anak.

Sementara itu Bachtiar *et al.*,(2016), menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kemiskinan balita adalah rendahnya Pendidikan Kepala Rumah

Tangga dan pendidikan ibu, pekerjaan kepala rumah tangga dan pekerjaan ibu, tinggal di wilayah pedesaan serta memiliki balita melebihi dari satu orang. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhallima (2020) kesimpulannya menemukan bahwa kesejahteraan anak sangat tergantung pada karakteristik kepala rumah tangga. Sehingga, pilihan dan perilaku kepala rumah tangga, baik sosial maupun finansial, berdampak pada kemiskinan anak. Lekobane & Roelen (2020) menambahkan usia dan jenis kelamin anak sebagai factor yang juga mempengaruhi kemiskinan anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi deprivasi kemiskinan anak dengan menggunakan pendekatan multidimensi di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peluang terjadinya kemiskinan multidimensi pada anak di Indonesia?
3. Apa rekomendasi yang berguna bagi pengentasan kemiskinan anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kondisi deprivasi kemiskinan anak dengan menggunakan pendekatan multidimensi di Indonesia
2. Untuk menganalisis faktor apa sajakah yang mempengaruhi peluang terjadinya kemiskinan pada anak di Indonesia
3. Memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengentasan kemiskinan anak di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kemiskinan multidimensi yang dihadapi oleh anak di Indonesia, serta dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilita yang mempengaruhi kemiskinan yang terjadi pada anak di Indonesia.

Dari sisi metodologi, diharapkan dapat memberikan gambaran baru terhadap hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dimana dalam penelitian ini menambahkan variabel interaksi antar variabel bebas yang belum pernah dilakukan dalam penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat ukur bagi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan strategi apa yang paling tepat agar pengentasan kemiskinan yang merupakan masalah utama bagi hampir banyak negara dapat diberantas dari akarnya dengan merumuskan kebijakan yang tepat terutama terkait dengan kemiskinan anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang dihadapi oleh anak, dengan umur 0-17 tahun yang mewakili kelompok umur, dengan melakukan pengolahan dan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 untuk melihat kondisi kemiskinan anak di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang anak mengalami miskin multidimensi.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I (pendahuluan) yang terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan tentang urgensi penelitian, sejumlah fakta dan data yang mejadi persoalan dalam kemiskinan anak.

Bab II (landasan teori), pada bab ini dijelaskan tentang konsep dasar tentang kemiskinan, kemiskinan multidimensi, kemiskinan anak, dan variabel-variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III (Metode Penelitian), bab ini menjelaskan metode penelitian yang memuat model empiris, variabel dan definisi variabel, data dan sumber data yang digunakan serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV (pembahasan), bab ini berisi tentang hasil penelitian, menjabarkan hasil penelitian dari pengujian yang telah dilakukan terhadap kemiskinan anak dan variabel variabel yang mempengaruhinya.

Bab V (penutup), bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi yang diberikan untuk kebijakan.